



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KENAIKAN HARGA GAS BUMI MENGANCAM INDUSTRI

Dewi Wuryandani

Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.wuryandani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Masuknya Indonesia ke era endemi sejak 21 Juni 2023 membawa angin segar bagi industri manufaktur untuk kembali pulih dan merealisasikan ekspansi bisnis yang tertunda selama tiga tahun akibat pandemi Covid-19. Sayangnya, peluang itu hilang oleh keputusan pemerintah yang menaikkan harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi tujuh industri penerima manfaat, yaitu pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet, dan oleokimia. Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91 Tahun 2023 yang berlaku mulai 19 Mei 2023, HGBT naik dari USD6 per MMBTU menjadi maksimal USD7 per MMBTU. Aturan tersebut mengeliminasi Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2020 yang menetapkan HGBT sebesar USD6 per MMBTU.

Adanya kenaikan HGBT berdampak luas bagi industri. Peningkatan HGBT akan menaikkan biaya produksi sekitar 3-6% dan mengancam daya saing produk industri. Aturan baru tersebut dapat menggerus pasar produk lokal di dalam negeri seiring semakin menurunnya daya saing akibat kenaikan harga gas bumi. Perubahan aturan di tengah jalan ini menimbulkan ketidakpastian usaha dan menghilangkan momentum bagi industri untuk mengejar ketertinggalan selama pandemi.

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Yustinus Gunawan, mengkhawatirkan kenaikan HGBT ini akan mengancam momentum pemulihan ekonomi yang sudah *on track* dan diperjuangkan cukup lama. Menurutnya, Kepmen ESDM Nomor 91 Tahun 2023 kontra produktif bagi industri. Kebijakan HGBT USD6 per MMBTU sangat penting bagi industri yang tengah berjuang untuk mengembalikan bisnis seperti sebelum pandemi. Terlebih, kebijakan harga gas bumi USD6 per MMBTU baru akan berakhir tahun depan. Sesuai aturan, Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2020 berlaku hingga 2024, tetapi belum sampai 2024 sudah keluar revisinya. Jadi diharapkan Kepmen ESDM Nomor 91 Tahun 2023 dapat direvisi untuk ditunda sampai 2024 agar industri dapat sedikit bernafas setelah berakhirnya pandemi. Selain penundaan kenaikan HGBT, pelaku usaha juga berharap adanya jaminan pasokan gas bumi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal itu penting di tengah upaya industri untuk ekspansi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan seoptimal mungkin di era endemi saat ini.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia, Edy Suyanto, mengatakan kenaikan HGBT di tengah melemahnya daya beli masyarakat tentunya akan berdampak pada penjualan industri keramik dalam negeri. Oleh karena itu, diharapkan adanya atensi khusus dari pemerintah bahwa kenaikan harga gas bumi yang mulai berlaku pada 19 Mei 2023 harus disertai dengan perbaikan kelancaran pasokan gas bumi di Jawa Timur. Selama kuartal I-2023, para pelaku usaha industri keramik di wilayah Jawa Timur hanya mendapat Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sebesar 65%. Kondisi tersebut mengakibatkan para pelaku usaha industri keramik harus membayar pemakaian gas bumi di rentang USD6,3-USD6,5 per MMBTU.

Hal ini tentunya akan semakin memberatkan dan memengaruhi daya saing jika masih dikenai pembatasan volume gas bumi 65%, yang mana nanti mengakibatkan para pelaku usaha industri keramik harus membayar di rentang USD6,8-USD7 per MMBTU. Sementara untuk Jawa Barat, harganya naik dari USD6 per MMBTU ke USD6,5 per MMBTU dan dikenai AGIT rata-rata di angka 90% pada kuartal I-2023.

Atensi DPR

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan HGBT. Kenaikan HGBT ini berdampak luas bagi industri karena akan menaikkan biaya produksi sekitar 3-6% dan mengancam daya saing produk industri. Aturan baru tersebut juga dapat menggerus pasar produk lokal di dalam negeri seiring semakin menurunnya daya saing akibat kenaikan harga gas bumi. Adanya perubahan aturan di tengah jalan menimbulkan ketidakpastian usaha dan menghilangkan momentum bagi industri untuk mengejar ketertinggalan selama pandemi sehingga perlu dipertimbangkan untuk menunda kenaikan HGBT. Selain itu, para pelaku usaha juga berharap adanya jaminan pasokan gas bumi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan industri perlu meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif dalam upaya meminimalisir dampak kenaikan HGBT terhadap potensi turunnya daya saing produk industri dalam negeri. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk dapat memasok gas bumi sesuai kebutuhan industri.

Sumber

Investor Daily, 5 Juli 2023; dan
tribunnews.com, 5 Juli 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023